Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia

¹Fachri Muhamad Sidiq, ²Siti Nurma Rosmitha, ³Meichio Lesmana, ⁴Muhammad Syafiq F, ⁵Muhammad Iqbal F

Fakultas Ekonomi dan Manajemen Jurusan Ekonomi Islam Universitas Darussalam Gontor
Fakultas Agama Islam, Konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Email: meichiolesmana@unida.gontor.ac.id

Received: 09-12-2023	Revised: 15-01-2024	Accepted: 16-01-2024
----------------------	---------------------	----------------------

Abstract

Indonesia is a country that has a population of 2,000.00. From a well-known business magazine in the US, namely *Global Finance*, recently released a ranking of countries based on the level of gross domestic product (GDP) per capita and Indonesia is at 122. According to the Central Statistics Agency (BPS) in March 2021 in Indonesia there are 27.54 million people who are below the poverty line and the benchmark for people living below the poverty line is those who have an income of Rp.472,525 per capita per month. set. In the pillars of Islam, zakat is paid and given to the group who receives it (asnaf). Zakat occupies a very important position in Islam so that it is positioned as the third pillar of Islam after prayer. Calculation of zakat and poverty rates, the number of workers who issue professional zakat can be the answer to straighten out the mistakes of people who have not received professional zakat. Professional zakat is zakat imposed on professional income if it has reached the nishab. From the verse of the *Qur'an Surah Al-Baqarah* verse 267: which means "O people who believe, spend some of what we remove from the earth for you ..." the verse describes the livelihood that is given and the nature of that livelihood. The command of the verse is obligatory, then all business results in whatever form must be paid for zakat, including the salary of an employee, if his salary has reached the conditions stipulated in the context of zakat. One of the tasks of zakat management institutions whose existence is protected by law is to realize the role of zakat as a solution to overcome poverty. Productive zakat is to increase or as business capital mustahiq. Zakat results in a redistribution of market commodities from the rich to the poor. In principle, there are two ways of distributing zakat through wealth and income. Which is a second type of distribution, especially if it is given in cash to mustahik. Two functions at once, namely the income function and functional redistribution function.

Keyword: Poverty Level, Zakat, Productive Zakat

Abstrak

Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak dari Majalah bisnis ternama di AS yaitu *Global Finance* baru merilis peringkat Negara berdasarkan tingkatan produk domestik bruto (PDB) Perkapita dan Indonesia berada di urutan ke 122. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2021 di Indonesia terdapat 27,54 juta penduduk yang berada di garis bawah kemiskinan dan tolak ukur dari masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yaitu yang memiliki pendapatan Rp472.525 perkapita perbulan Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Dalam rukun Islam zakat ditunaikan dan diberikan kepada golongan yang menerimanya (asnaf). Zakat menempati kedudukan yang sangat penting dalam Islam sehingga diposisikan menjadi rukun Islam yang ketiga setelah shalat. Perhitungan zakat dan angka kemiskinan, angka pekerja yang mengeluarkan zakat profesi dapat menjadi jawaban untuk meluruskan kekeliruan masyarakat yang belum menerima adanya zakat profesi. Zakat profesi yaitu zakat yang dikenakan pada penghasilan profesi apabila telah mencapai nishab. Dari ayat *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 267: yang artinya "wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari apa yang kami

keluarkan dari bumi untuk kamu...” ayat tersebut menguraikan tentang nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. perintah ayat tersebut wajib maka, semua hasil usaha apapun bentuknya wajib dizakati termasuk gaji seorang pegawai, jika gajinya sudah mencapai syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dilindungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Zakat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Zakat menghasilkan redistribusi komoditas pasar dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Pada prinsipnya ada dua jalur pendistribusian zakat melalui kekayaan dan pendapatan. Yang merupakan suatu jenis distribusi yang kedua terutama jika diberikan dalam bentuk uang tunai kepada mustahik. Dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendapatan dan fungsi redistribusi fungsional.

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Zakat, Zakat Produktif

Pendahuluan

Salah satu persoalan sosial serta ekonomi yang tak ada habisnya dibicarakan oleh banyak kalangan ialah bagaimana strategi yang sempurna serta harus segera direalisasikan dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial seperti kurang maksimal pada acara pemberdayaan, jaminan kesehatan, pada bidang pendidikan sampai menyatu pada problem yang paling dasar yaitu pengentasan kemiskinan. oleh sebab itu dalam sejarah perkembangan islam, zakat sebagai pilar utama sumber penerimaan negara serta berperan sangat krusial menjadi sarana penanggulangan kemiskinan, syiar kepercayaan islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu infrastruktur, pembiayaan dan pembangunan angkatan perang, serta keamanan penyediaan layanan kesejahteraan sosial lainnya. Filosofi zakat dalam kepercayaan islam merupakan salah satu cara lain pendanaan bagi kemaslahatan umat yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraan serta perbaikan ekonomi umat¹.

Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam menaikkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. dengan demikian, dalam pemanfaatan zakat harus ada perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak yang berkewajiban dan memiliki wewenang terhadap bagaimana semestinya strategi yang mampu dilakukan pada hal pengelolaan hingga pendistribusian serta pemanfaatan dana zakat, sebagai akibatnya dana zakat tidak hanya disalurkan kepada orang-orang yang dikenal, namun harapannya mampu lebih dari itu supaya sesuai serta tercapainya tujuan yang diharapkan.

¹ Muhammad Ngasifudin, ‘Konsep Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah’, *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5.2 (2016), 219 <[https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\).219-231](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2).219-231)>.

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang menerimanya (asnaf)².

Tidak ada keraguan bahwasanya zakat menempati satu kedudukan yang sangat penting dalam islam sebagai akibatnya diposiskan menjadi rukun islam yang ketiga sesudah shalat. Perintah untuk menunaikan shalat pada Al-Qur'an sangat seringkali diikuti menggunakan kata zakat sebab selain zakat merupakan pajak yang bersifat religious-economic yang diwajibkan pada muzakki oleh negara untuk dialokasikan kepada mustahiq sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, zakat juga termasuk kedalam ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan sama penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat³.

Zakat penghasilan yang dikenal sebagai zakat profesi. Zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah⁴. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dilindungi undang-undang ialah mewujudkan peran zakat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan. Zakat serta kondisi ekonomi umat mempunyai korelasi timbal balik yang sangat erat. taraf ekonomi umat semakin baik akan menaikkan penerimaan zakat, dan sebaliknya dana zakat yang dikelola dan diserahkan secara benar kepada kelompok mustahiq diharapkan merubah tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat.

Zakat produktif merupakan bentuk eksploitasi zakat, jadi pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau menjadi modal usaha mustahiq. dengan pernyataan bahwa mustahiq harus mengembalikan modal usaha, sebagai sifat strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Dengan pengembalian modal tersebut menjadi infaq dari yang akan terjadi usaha mereka,

² M. Anton Athoillah, *Zakat Dan Wakaf, Simbiosis Rekatama Media*, 2019.

³ Loc. Cit, Hal. 227

⁴ Hukum Islam, '-Zakat-Profesi-Antara-Pendukung-Dan-Penentang'.

kemudian digulirkan lagi pada mustahiq lain. dengan demikian, pemetik manfaat zakat semakin bertambah⁵.

Tinjauan Pustaka (Jika Ada)

Hasil penelitian dari Ali Trigiyatno, jurnal hukum Islam, vol. 14, No. 2, Desember 2016, dengan judul “*zakat profesi antara pendukung dan penentang*”, hasil penelitian ini yaitu memaparkan argumen pendukung dan penentang zakat profesi, yang didapatkan oleh penulis, argumen pendukung zakat profesi lebih kuat dan meyakinkan, baik dari segi teks dan terutama maqashid asy-syari’ah. kedua buku BI seri ekonomi dan keuangan syariah tentang pengelolaan zakat yang efektif: konsep dan praktik di beberapa Negara yang membahas tentang zakat dan pengentasan kemiskinan, ekonomi zakat, zakat, sejarah dan kerangka hukum zakat, tata kelola zakat, sistem dan kelembagaan zakat dan regulasi dan tata kelola zakat di berbagai Negara, ketiga dari akun BAZNAS yang membahas angka pekerja yang mengeluarkan zakat. Dan terakhir dari opini teguh yang membahas strategi pengelolaan zakat upaya mensejahterakan masyarakat.

Metodologi Penelitian

Dalam kajian penelitian ini, digunakan metode penelitian berupa literature review dan referensi-referensi baik buku, jurnal maupun website yang berkenaan tentang zakat, strategi pendistribusian zakat guna mensejahterakan masyarakat, pengelolaan zakat di 3 tahun terakhir sekaligus perhitungan zakat dan angka kemiskinan, angka pekerja yang mengeluarkan zakat profesi dapat menjadi jawaban untuk meluruskan kekeliruan masyarakat yang belum menerima adanya zakat profesi.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Angka Kemiskinan di Indonesia

Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak dari Majalah bisnis ternama di AS yaitu Global Finance baru merilis peringkat Negara berdasarkan tingkatan produk domestik bruto (PDB) Perkapita dan Indonesia berada di urutan ke 122 dengan PDB per kapita US\$4.380 atau Rp39,4 juta per tahun⁶. Dan metode yang dilakukan yaitu dengan membandingkan taraf hidup dari penduduk suatu Negara

⁵ Jurnal Islamic Circle and others, ‘ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari ’ Ah)’, 2.1 (2021), 54–55.

⁶ BPS, ‘Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020’, *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019, 2020*, 300 <<https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/60138aa2d7b9b78802991240/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-di-indonesia-tahun-2019.html>>.

secara keseluruhan seperti indikator dari biaya hidup, inflasi, serta nilai tukar suatu Negara yang dikonversikan ke mata uang yang telah ditetapkan bersama yaitu dollar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2021 di Indonesia terdapat 27,54 juta penduduk yang berada di garis bawah kemiskinan dan tolak ukur dari masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yaitu yang memiliki pendapatan Rp 472.525 perkapita perbulan⁷.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2021 naik dibanding 2020 dengan penjelasan pada Maret 2021 terdapat sebesar 27,54 juta orang dan pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun pedesaan meningkat⁸.

Daerah/Tahun	Jumlah penduduk miskin (juta)	Persentase penduduk miskin	Perubahan jumlah penduduk miskin (juta) (2021-2020)	Perubahan persentase penduduk miskin (2021-2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2020	11,16	7,38	1,01	0,51
Maret 2021	12,17	7,89		
Perdesaan				
Maret 2020	15,26	12,82	0,11	0,28
Maret 2021	15,37	13,10		
Perkotaan + Perdesaan				
Maret 2020	26,42	9,78	1,12	0,36
Maret 2021	27,54	10,14		

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2020 dan Maret 2021

Adapun persentase penduduk miskin di Indonesia baik dari desa maupun dari kota. Pada tahun 2019 sebesar 9,14%, 2020 sebesar 9,78%, dan pada tahun 2021 sebesar 10,14⁹.

⁷ Badan Pusat Statistik, 'Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019', *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019*, 1, 2019, xvi+72 <<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>>.

⁸ *Ibid*, hal. 11

⁹ *Ibid*, hal. 15

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	K	D	K + D	K	D	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2002 ¹⁾	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003 ²⁾	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004 ²⁾	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005 ²⁾	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006 ³⁾	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007 ³⁾	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008 ³⁾	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009 ³⁾	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010 ³⁾	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
2011 ⁴⁾	11,08	19,04	30,12	9,23	15,72	12,49
2012 ⁴⁾	10,71	18,54	29,25	8,79	15,10	11,96
2013 ⁴⁾	10,39	17,78	28,17	8,42	14,28	11,36
2014 ⁴⁾	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25
2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22
2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86
2017	10,67	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64
2018	10,14	15,81	25,95	7,02	13,20	9,82
2019	9,99	15,15	25,14	6,69	12,85	9,41
2020	11,16	15,26	26,42	7,38	12,82	9,78
2021	12,17	15,37	25,54	7,89	13,10	10,14

Catatan:

¹⁾ Dihitung berdasarkan data Susenas Modul Konsumsi 2002.

²⁾ Dihitung berdasarkan data Susenas Panel Modul Konsumsi Feb 2003, 2004 dan 2005

³⁾ Dihitung berdasarkan data Susenas Panel Modul Konsumsi Maret 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010

⁴⁾ Dihitung berdasarkan data Susenas Modul Konsumsi Maret 2011, 2012, 2013, 2014 dengan perimbangan proyeksi penduduk

Keterangan:

K = Perkotaan

D = Perdesaan

K + D = Perkotaan + Perdesaan

Dalam kurun 3 tahun terakhir ini persentase angka kemiskinan di indonesia meningkat dikarenakan ekonomi di indonesia yang sedang mengalami guncangan akibat pandemi covid-19 yang akan berdampak pada kesejahteraan penduduk di indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Haughton & Khandker (2009), ada empat alasan mengukur kemiskinan yaitu¹⁰:

1. Merupakan instrumen yang kuat untuk memfokuskan pembuat kebijakan pada kehidupan orang miskin
2. Mengidentifikasi orang miskin sehingga dapat memberikan intervensi kebijakan yang tepat
3. Memantau dan mengevaluasi proyek dan kebijakan yang digunakan untuk orang miskin
4. Mengevaluasi lembaga yang mempunyai tujuan membantu masyarakat miskin

B. Pengelolaan Zakat dalam Waktu 3 Tahun Terakhir (2019, 2020, dan 2021)

Badan Amil Zakat Nasional menyatakan bahwasannya pada September 2019 Baznas telah mendata dan terdapat 24.785.870 jumlah penduduk miskin di Indonesia diantaranya terdapat 9.857.750 penduduk dari daerah perkotaan dan 14.925.120

¹⁰ *Ibid*, hal. 4

penduduk dari daerah pedesaan, dengan demikian dapat diketahui bahwasannya daerah pedesaan memiliki persentase yang besar terhadap penduduk miskin Indonesia¹¹.

Pada September 2020 Baznas telah mendata jumlah penduduk miskin di Indonesia yaitu terdapat 27.549.69 masyarakat miskin di Indonesia diantaranya terdapat 12.038.500 penduduk dari perkotaan dan 15.511.190 penduduk miskin dari daerah pedesaan dengan demikian dapat di ketahui bahwasannya jumlah penduduk miskin yang ada di pedesaan lebih besar dibandingkan penduduk perkotaan¹².

Pada September 2021 Badan Amil Zakat Nasional telah mendata pula jumlah penduduk miskin di Indonesia yaitu sebesar 26.503.650 penduduk miskin di Indonesia diantaranya terdapat 11.859.340 jiwa penduduk miskin di daerah perkotaan dan terdapat 14.644.300. Dari data 3 tahun terakhir ini dapat di ketahui bahwasannya jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan¹³

Tahun	Perkotaan	Pedesaan
2019	9.857.750	14.925.120
2020	12.038.500	15.511.190
2021	11.859.340	14.644.300
Jumlah	33.755.590	45.080.610

Sumber: data diolah

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS telah menyusun suatu laporan keuangan pada Desember 2020 dan dapat diketahui bahwa Kas yang berada di tahun 2019 yaitu sebanyak Rp31.788.045.886 dan Kas pada tahun 2020 sebanyak Rp51.424.123.750. dengan demikian dapat di ketahui bahwasannya dari pihak baznas pun dapat meringankan beban dari penduduk miskin¹⁴.

Terdapat beberapa program Baznas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat indonesia. Baznas memberikan bantuannya kepada orang- orang yang membutuhkan misalnya ketika bencana tiba maka daerah tersebut mendapat bantuan dari baznas, selain itu terdapat Beasiswa pendidikan yang diberikan oleh baznas, dan terdapat program dari

¹¹ BPS, 'Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi Dan Daerah 2020-2021', *Badan Pusat Statistik*, 2020 <<https://bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html>>.

¹² *Ibid*, Hal. 1

¹³ *Ibid*, Hal. 1

¹⁴ *Ibid*, hal 1

Baznas juga yaitu sebagai peminjam modal ketika seseorang akan memiliki Usaha. Adapun tujuan dari Baznas yaitu¹⁵:

- 1) Terwujudnya Baznas sebagai lembaga pengelolaan zakat yang kuat, terpercaya, dan modern
- 2) Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal
- 3) Terwujudnya penyaluran ZIS DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat dan pengurangan kesenjangan sosial
- 4) Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas dan sejahtera
- 5) Terwujudnya sistem manajemen dan basis pengelolaan data nasional yang mengadopsi teknologi Mutakhir

C. Zakat Profesi

Zakat secara bahasa sebagaimana dijelaskan oleh abu Muhammad ibnu qutaibah asal dari kata az-zaka'wa an-nama'waaz-ziyadah. Dinamakan demikian sebab zakat menumbuhkan harta, literatur arab memperkenalkan zakat profesi dengan sebutan waktu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah yang merupakan bebas, jadi zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. yang dimaksud menggunakan zakat profesi ialah zakat yang dikenakan di penghasilan profesi Jika telah mencapai nisab. berdasarkan fatwa majelis ulama Indonesia No.3 tahun 2003, "penghasilan" ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, serta lain-lain yg diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, juga tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya¹⁶.

Dari ayat al-qur'an keumuman kandungan surat Al-baqarah ayat 267: yang artinya "*wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*"¹⁷ Ayat ini menguraikan tentang nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Bahwa yang dinafkahkan yang baik-baik, tapi tidak semua dinafkahkan, ada yang wajib dinafkahkan dan ada juga yang dianjurkan. Dan apa yang dinafkahkan itu hasil dari usaha diri sendiri dan apa yang dikeluarkan dari perut bumi. Perlu menafkahkan sebagian dari apa yang didapatkan dari perut bumi maupun dari usaha sendiri. Jika menelaah ayat ini dalam arti perintah wajib

¹⁵ 'BAZNAS - Badan Amil Zakat Nasional' <<https://baznas.go.id/profil>>.

¹⁶ Op.cit, Islam.Hal. 140

¹⁷ Al Quran (Al Baqarah).

maka seluruh hasil usaha apapun bentuknya harus dizakati termasuk gaji seseorang pegawai. Jika gajinya telah mencapai syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga menggunakan hasil pertanian seperti padi, lada, butir dan lain-lain semua ini mencakup dari kalimat yang kami keluarkan dari perut bumi.

D. Angka Pekerja yang Mengeluarkan Zakat Profesi

Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. (*Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019*). Pada tahun 2021 nishab zakat pendapatan atau penghasilan senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp. 79.738.415 per tahun atau Rp. 6.644.868, per bulan. Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas dengan kadar 2,5%. (*SK BAZNAS Tahun 2021 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa tahun 2021*). Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka harus dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari penghasilan tersebut. terdapat banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin juga tidak, menggunakan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan pada 1 bulan tidak mencapai nisab maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, lalu zakat ditunaikan apabila penghasilan bersihnya telah cukup nishab¹⁸.

Nisab zakat penghasilan : 85 gram emas

Kadar zakat penghasilan : 2,5%

Haul : 1 tahun

Cara menghitung zakat penghasilan

$2,5\% \times \text{Jumlah Penghasilan dalam 1 bulan}$

E. Pendistribusian Zakat guna Mensejahterakan Masyarakat

Zakat menghasilkan distribusi komoditas pasar dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Pada prinsipnya ada dua jalur pendistribusian zakat melalui kekayaan dan pendapatan. Zakat merupakan suatu jenis distribusi yang kedua terutama jika diberikan dalam bentuk uang tunai kepada mustahik. Dalam perekonomian islam dua hal mendapatkan perhatian besar yaitu bagaimana agar faktor produksi tidak mengumpul

¹⁸BAZNAS - Badan Amil Zakat Nasional'.

pada sekelompok orang serta rendahnya kesenjangan pendapatan. Zakat memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi redistribusi pendapatan dan fungsi redistribusi fungsional. Jika zakat ini didistribusikan dari redistribusi pendapatan dengan cara uang tunai akan meningkatkan daya beli mustahik atau meningkatnya permintaan. Sebaliknya jika zakat didistribusikan dari redistribusi fungsional dengan cara memberi apa yang diproduksi maka mustahik akan memperbanyak kapasitas produksi yang pada saatnya akan meningkatkan penawaran atau produksi dari mustahik¹⁹.

Masih banyak kita saksikan dalam kehidupan ini kesenjangan dalam kehidupan, antara si kaya dengan si miskin. salah satu cara yang bisa menjembatani agar hidup ini sejahtera serta merata merupakan adanya zakat, infaq serta sedekah. Konsep zakat ini seharusnya bisa menjadi pemberdaya si kaya terhadap si miskin sebagai akibatnya akan mampu tercipta kehidupan yang lebih sejahtera. Konsep zakat yang berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan umat ini merupakan bagian dari ekonomi islam tetapi sayangnya rakyat muslim termasuk pemerintah tampak lebih sibuk dengan perbankan serta keuangan syariah semata. menggunakan adanya konsep zakat maka kehidupan ini akan semakin sejahtera serta kehidupan yang tentram, secara fungsional zakat mencakup beberapa hal antara lain adalah²⁰:

1. Zakat, infaq dan sedekah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahiq, terutama fakir-miskin. Termasuk di dalamnya membantu di bidang pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi.
2. Zakat, infaq dan sedekah terkait dengan etos kerja
3. Zakat, infaq, dan sedekah terkait dengan aktualisasi potensi dana untuk membangun umat, seperti untuk membangun sarana pendidikan, sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi dan komunikasi serta yang lainnya.
4. Zakat infaq dan sedekah akan mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup.
5. Zakat mencerminkan semangat dimana trend dunia saat ini menuju *sharing economy*. Diyakini akan menjadi solusi untuk mengatasi masalah ekonomi termasuk resesi.

Kesimpulan

Dari hasil analisis diatas dapat diketahui bahwasannya dari tahun 2019, 2020. Dan 2021 jumlah angka kemiskinan di indonesia meningkat dikarenakan dikarenakan ekonomi di indonesia yang sedang mengalami guncangan akibat pandemi covid-19 yang

¹⁹ Bank Indonesia, *Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah: Usaha Mikro Islam*, Isbn, 2016. Hal. 49SS

²⁰Teguh Ansori, 'No Title', *NU Online* <[https://nu.or.id/prefix/TEGUH_ANSORI*\(senin\)](https://nu.or.id/prefix/TEGUH_ANSORI*(senin))>.

akan berdampak pada kesejahteraan penduduk di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Zakat menumbuhkan harta, literatur Arab memperkenalkan zakat profesi dengan sebutan waktu *kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* yang artinya bebas, jadi zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Bahwa yang dinafkahkan yang baik-baik, tapi tidak semua dinafkahkan, ada yang wajib dinafkahkan dan ada juga yang dianjurkan. Zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Zakat memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi redistribusi pendapatan dan fungsi redistribusi fungsional. Jika zakat ini didistribusikan dari redistribusi pendapatan dengan cara uang tunai akan meningkatkan daya beli mustahik atau meningkatnya permintaan. Zakat mencakup beberapa hal diantaranya meningkatkan kesejahteraan, terkait dengan etos kerja, terkait dengan aktualisasi potensi dana untuk membangun umat, mengakibatkan kesejahteraan hidup, dan mencerminkan semangat dimana trend dunia saat ini menuju *sharing economy*.

Daftar Rujukan

Al Quran (Al Baqarah)

Ansori, Teguh, 'No Title', *NU Online* <[https://nu.or.id/prefix/TEGUH ANSORI*\(senin\)](https://nu.or.id/prefix/TEGUH%20ANSORI*(senin))>

Athoillah, M. Anton, *Zakat Dan Wakaf, Simbiosis Rekatama Media*, 2019

Badan Pusat Statistik, 'Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019', *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019*, 1, 2019, xvi+72 <<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>>

Bank Indonesia, *Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah: Usaha Mikro Islam, Isbn*, 2016

'BAZNAS - Badan Amil Zakat Nasional' <<https://baznas.go.id/profil>>

BPS, 'Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi Dan Daerah 2020-2021', *Badan Pusat Statistik*, 2020 <<https://bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html>>

———, 'Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020', *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019*, 2020, 300 <<https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/60138aa2d7b9b78802991240/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-di-indonesia-tahun-2019.html>>

Circle, Jurnal Islamic, Fakultas Syariah, Maqashid Syariah, and Hukum Islam, 'ZAKAT

PROFESI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari ' Ah)', 2.1 (2021), 54–55

Islam, Hukum, '-Zakat-Profesi-Antara-Pendukung-Dan-Penentang'

Ngasifudin, Muhammad, 'Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5.2 (2016), 219 <[https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\).219-231](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2).219-231)>